

**PERAN LEMBAGA SANIRI NEGERI DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PADA NEGERI DI KABUPATEN MALUKU
TENGAH**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

FELIX ABRAHAM SOEDIONO

NIM : 21.C1.0091

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Saniri Negeri adalah sebuah Lembaga Adat yang terdapat pada *Negeri* (Desa Adat) di Provinsi Maluku. Pada masa orde baru, dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menggeneralisasi Lembaga Adat menjadi bagian dari Pemerintahan Desa yang melemahkan wewenang dari Lembaga Adat termasuk *Saniri Negeri*. *Saniri Negeri* sebagai Lembaga Adat berwenang dalam menangani permasalahan dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat (*Negeri*), namun akibat adanya generalisasi melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa melemahkan wewenang *Saniri Negeri*. Lembaga Adat kembali diakui melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *Saniri Negeri* turut kembali diakui sebagai Lembaga Adat. Pengakuan kembali *Saniri Negeri* sebagai lembaga adat berarti bahwa *Saniri Negeri* berwenang untuk menjalankan tugas Lembaga Adat Desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan peraturan turunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Saniri Negeri* dalam *Negeri* di Kabupaten Maluku Tengah serta Peran *Saniri Negeri* dalam Penyelesaian Konflik di Maluku Tengah.

Kata Kunci : Lembaga Adat Desa, Penyelesaian Konflik, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Masyarakat Hukum Adat, *Saniri Negeri*, *Negeri*.